

Bogor, 04-04-2018

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan yang bertanda-tangan dibawah ini :

N a m a : Muhammad Hafidz
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Taty Wuni IV, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012
Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, Bukti P-1] terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 182 huruf l UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

 - a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. lembaga negara”*.
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengujian norma sepanjang frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu, yang menyatakan:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan :

(l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.1 dan II.2 tersebut diatas, maka Pemohon menguraikan hal sebagai berikut :

- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, yang ber-Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173062609800003 [Bukti P-3], yang merupakan Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2013, dengan No. Urut 19 [Bukti P-4] dan memperoleh 182.921 suara [Bukti P-5].

Pemohon diberikan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

- b. Sebagai perorangan warga negara Indonesia yang belum pernah menjadi anggota Partai Politik dan hendak kembali menjadi Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan DPD RI, Pemohon telah dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Namun hak konstitusional Pemohon tersebut, berkaitan dengan hakikat keberadaan lembaga DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerahnya, berpotensi akan dirugikan dengan norma Pasal 182 huruf l UU Pemilu, sepanjang frasa “pekerjaan lain” yang dalam penjelasannya tertulis Cukup Jelas, dan tidak dijelaskan mengenai apakah yang dimaksud pekerjaan lain, apakah diantaranya termasuk aktif sebagai fungsionaris partai politik?

- c. Dengan tidak adanya pemaknaan yang jelas dan terang benderang sepanjang frasa “*pekerjaan lain*” pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu, telah memberikan kemungkinan bagi fungsionaris partai politik untuk turut serta ikut dalam Pemilu sebagai Calon Perseorangan DPD. Sehingga, Pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, sepanjang hakikat keberadaan lembaga DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik manapun.
 - d. Apabila sepanjang frasa “*pekerjaan lain*” pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka Pemohon dan warga negara lainnya yang dapat saja merasa terwakili kepentingannya oleh permohonan *a quo* sebagai perorangan masyarakat daerah, mempunyai harapan untuk terwakili kepentingan daerahnya dari anggota DPD yang bebas dari kepentingan partai politik manapun.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 182 huruf l UU Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [disebut UU Pemilu].
2. Bahwa UU Pemilu, diantaranya memuat Pasal 182, yang menyatakan :
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan :
 - a. *Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih;*
 - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - d. *dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
 - e. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
 - f. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - g. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana;*
 - h. *sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
 - i. *terdaftar sebagai Pemilih;*

- j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
 - p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
3. Bahwa frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu, haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu :
- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
4. Bahwa Pasal 22D UUD 1945, mengatur mengenai fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yaitu :
- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 - (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Selain itu, keberadaan DPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat (dan) daerah memiliki legitimasi yang kuat, seperti halnya memberikan implikasi harapan dari rakyat kepada DPD, karena anggota DPD secara perseorangan dan secara langsung dipilih oleh rakyat, berbeda dari pemilihan Anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik.

7. Bahwa meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI/2008 tanggal 01 Juli 2008, pada pertimbangan hukumnya mempertimbangkan kebolehan anggota partai politik turut serta sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan dalam pencalonan anggota DPD, akan tetapi, keberadaan DPD haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai politik.

Sehingga, boleh jadi calon perseorangan DPD yang berasal dari anggota partai politik biasa tidak mempunyai jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di partai politik, namun apabila calon perseorangan DPD berasal dari fungsionaris (pengurus yang menduduki fungsi) partai politik, maka akan menjadi tidak terhindarkan terjadinya benturan kepentingan yang berujung pada berubahnya substansi keberadaan DPD sebagai representasi daerah (wilayah).

Frasa "*pekerjaan lain*" pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu, diikuti dengan frasa "*yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*". Sehingga, apabila anggota DPD masih mempunyai jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di partai politik, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang kelembagaan DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik.

Selain itu, patut juga menjadi bahan pertimbangan, apakah fungsionaris partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu, juga akan mengakibatkan benturan kepentingan apabila harus menjalankan 2 (dua) peran, yaitu sebagai anggota DPD dan sebagai fungsionaris partai politik?

Menurut Pemohon, sangat terbuka kemungkinannya ada konflik kepentingan meskipun partai politik yang menjadi wadah aspirasi politiknya tidak ikut menjadi peserta pemilu. Hal tersebut dapat dimungkinkan terjadi, karena masih adanya kemungkinan di pemilu yang akan datang untuk kembali mendaftar jadi peserta pemilu. Sehingga anggota DPD yang juga bekerja sebagai fungsionaris partai politik (walaupun bukan peserta pemilu) akan diwajibkan oleh partai politiknya untuk mewujudkan keinginan partai politik tersebut menjadi peserta pemilu yang akan datang. Oleh karenanya, keadaan itu akan memaksa terjadinya benturan kepentingan sebagai anggota DPD dan juga sebagai fungsionaris partai politik.

Dengan demikian, frasa "*pekerjaan lain*" pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu, haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai fungsionaris partai politik.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus permohonan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan frasa “*pekerjaan lain*” pada Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai fungsionaris partai politik.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat Pemohon,



Muhammad Hafidz